

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS AGROWISATA DI KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

AGNES FIRANTI EKEL

## Abstrak

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara (interview), Dokumentasi, Observasi. Informan dalam penelitian ini adalah semua organisasi pelaksana (pemerintah) dan masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk mencapai kedetailan informasi, informan lainnya dari masyarakat diseleksi melalui teknik *snowball sampling*.

Hasil penelitian diperoleh fakta bahwa para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding mengalami kesulitan modal untuk menggarap perkebunan mereka karena bantuan yang diberikan pemerintah sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk biaya penggarapan kebun terpaksa mereka harus meminjam uang dari bank melalui program kredit usaha rakyat (KUR) untuk itu mereka meminta komitmen pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada para petani agar mereka memperoleh kemudahan dalam pengembangan produksi hasil pertanian mereka. Para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding juga berharap kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada para petani mengenai cara bercocok tanam yang baik dan modern agar kualitas tanaman terutama sayur – mayur dapat ditingkatkan dan mencapai standar yang lebih baik seperti kentang Modoinding yang kualitasnya sudah terkenal dimana – mana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Agrowisata

## Abstract

The purpose of this research is to know how to implement the policy of Agrowisata-based tourism development in Modoinding Sub-district of South Minahasa Regency.

This research uses qualitative research methods. The data collection techniques used in this study are: interview, documentation, observation. The informant in this study is all implementing organizations (Governments) and communities as a service recipient. To achieve the information, other informant from the public are selected through snowball sampling technique.

The results of the research obtained the fact that the horticultural farmers in the district Modoinding have difficulty capital to develop their plantations because the help given by the government is very little so that not enough for the cost of the plantation is forced to borrow money from the bank through the Business Credit Program (KUR) for that they ask the Government's commitment to be able to distribute assistance to the farmers so that Horticultural farmers in the district Modoinding also hopes to the local government to carry out training activities to the farmers about the way of planting good and modern crops to the quality of plants especially vegetable-can be increased and achieve a better standard such as Modoinding potato that is well-known quality.

Keywords: policy implementation, tourism development, agrotourism

## PENDAHULUAN

Pembangunan melibatkan berbagai pelaku dalam proses pelaksanaannya, pelaku dalam pembangunan disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) Stakeholder yang dapat ikut andil dalam pengembangan pariwisata selain pemerintah adalah masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Muljadi (2016:33-34) bahwa kepariwisataan Indonesia berorientasi dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti pariwisata Indonesia berada di tangan rakyat atau disebut pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (*Community Based Tourism Development*). Pembangunan kepariwisataan Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kemajuan di bidang pariwisata menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja. Pengembangan usaha dan infrastruktur sehingga pengembangan pariwisata menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Pengembangan pariwisata di Indonesia telah diatur dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata, (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata buatan, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan tergarap usaha pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang masih menghadapi kendala dan tantangan.

Kebijakan yang berhubungan dengan wisata agro adalah keputusan Menteri Pertanian No.357/KPTS/HK.350/5/2002 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan. Di dalam pasal 1 angka 9 ditetapkan "bahwa

wisata perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja, dan promosi usaha perkebunan". Menteri pertanian juga menetapkan keputusan Menteri Pertanian No. 319/KPTS/KP/150/6/2003 tentang komisi wisata agro yang bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai daya tarik wisata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Kecamatan Modinding mempunyai banyak potensi yang menjanjikan untuk dapat dikembangkan sebagai daerah wisata karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah agrowisata yang ditanami dengan berbagai macam tanaman antara lain tanaman hortikultura, perkebunan, dan pangan. Adanya potensi-potensi tersebut dapat mendukung Kecamatan Modinding menjadi Kecamatan Agrowisata dengan cara menyediakan tanaman sayur mayur sebagai wisata petik sayur, menyediakan buah-buahan sebagai wisata petik buah dan usaha kecil mencegah sebagai produk lokal yang nantinya dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Modinding.

Menurut Sutjipta dalam Utama dan Junaedi (2018:86) Agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesehatan masyarakat petani. Pengembangan agrowisata merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi daerah maupun upaya - upaya pelestarian tersebut. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang

meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Berkembangnya agrowisata di suatu daerah khususnya di Kecamatan Modoinding tentu dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan ti-masyarakat dan pemerintahan sekitar. Upaya mewujudkan Agrowisata ini sangat diperlukan untuk memberdayakan sumber daya manusia sekitar, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Modoinding mayoritas bermata pencaharian sebagai petani perlu adanya suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya petani hortikultura yang sifatnya bimbingan, penyuluhan serta pelatihan untuk memberikan keterampilan bagi para petani dalam mengelola perkebunan mereka demikian pula menyangkut sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti penyediaan pupuk yang disubsidi pemerintah, alat penyemprot hama serta fasilitas tempat pelatihan bagi para petani yang berlokasi di Kecamatan Modoinding.

Namun demikian sejauh ini apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya para petani hortikultura belum banyak dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga masyarakat hanya melakukan sebisa yang mampu mereka mampu lakukan.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian yaitu : "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

implementasi kebijakan adalah : upaya yang dilakukan Pemerintah, yang bersifat berhasil atau aplikabel untuk menghasilkan output dan outcomes, sesuai yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung. Output

biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan Outcome adalah dampak dari kebijakan. yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan. " (Indiahono wiyanto, 2009 : 1431.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* mengemukakan implemenentasi kebijakan sebagai: *"Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also from the commandments or the decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process."* (Mazmanian, 1983:61), artinya implementasi kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dari kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

### **Dimensi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn and William N. (1981). dimensi implementasi kebijakan publik berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan publik, yang secara teoritis terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

Tahap-tahap kebijakan publik yaitu penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*) formulasi kebijakan (*policy implementation*), adopsi kebijakan. implementasi kebijakan (*policy implementation*) hingga penilaian kebijakan (Policy assessment)

Analisis kebijakan yaitu pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan Implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan

pada realisasi program, dalam hal ini bagaimana administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan hingga menerapkan kebijakan yang leleh melalui seleksi.

Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang di peroleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program, mempengaruhi respons dari mereka yang berada di luar kebijakan atau politik.

Menurut Dunn and William N. (1981) Implementasi kebijakan pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) model yaitu :

Model Perspektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan "sebelum" suatu kebijakan di terapkan. Model ini dapat disebut dengan model produktif. karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan

Model Retrospektif, yaitu analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat- akibat kebijakan "setelah" suatu kebijakan di implementasikan Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang dan atau telah diterapkan.

Model Integratif, yaitu perpaduan antara model prospektif dan retrospektif Model ini kerap kali disebut model komprehensif atau holistik, hal ini dikarenakan analisis ini dilakukan oleh konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin sebelum atau sesudah dilaksanakan atau dioperasikan

### **Pengertian Agrowisata**

Dalam istilah sederhana, agritourism didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian di mana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan, atau menikmati pertunjukkan, mengambil bagian aktifitas, makan suatu makanan atau

melewatkan malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman. Sementara di sisi lain, menurut Utama dan Junaedi (2018:84) agritourism adalah sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan. Di Indonesia, agrowisata di definisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.

Secara garis besar, menurut Utama dan Junaedi (2018:89) agrowisata dapat dibagi menjadi dua yaitu agrowisata ruang terbuka alami dan agrowisata ruang terbuka buatan. Agrowisata ruang terbuka alami yaitu lahan-lahan pertanian yang diolah langsung oleh para petani dengan kearifan lokal setempat. Sedang agrowisata ruang terbuka buatan yaitu lahan pertanian yang selain digunakan untuk budidaya juga didesain untuk menjadi objek Wisata.

Menurut Utama dan Junaedi (2018:89-90) agrowisata ruangan terbuka juga bisa dibagi menjadi dua pola yaitu agrowisata ruang terbuka dan tertutup. Agrowisata ruang terbuka berada pada alam bebas sehingga selain komoditi pertanian, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan alam dan udara yang segar. Sedangkan agrowisata ruang tertutup lebih mengandalkan pada komoditi nya, seperti pada industri atau sentra-sentra pengolahan hasil pertanian.

Menurut Pusat Data dan Informasi dalam Utama dan Junaedi (2018:86), agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (ecotourism) yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alamnya serta sebagai sarana pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Krik and Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2007:3). Oleh karena itu, strategi penelitian ini terarah pada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Bog dan Taylor mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur - prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati (pawito, 2007:84). Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

### **Informan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:108) informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua organisasi pelaksana (pemerintah) dan masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk mencapai kedetailan informasi, informan lainnya dari masyarakat diseleksi melalui teknik *snowball sampling* berdasarkan penguasaan mereka terhadap masalah dan informasi yang dibutuhkan berupa keterangan, cerita yang bernuansa mengungkap persepsi dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program daerah sertifikat tanah. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa selatan 1 orang.
2. Camat Modinding 1 orang.
3. Staf Kecamatan yang menangani bidang pariwisata 1 orang
4. Kepala Desa 3 orang
5. Petani Hortikultura 2 orang
6. Pengguna/Pengunjung Wisata 2 orang.

### **Sumber Data**

Menurut Loftland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara. Teknik pemilihan orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik purposive dikarenakan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Penentuan orang yang diwawancarai atau responden dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dikarenakan orang tersebut menduduki posisi terbaik yang dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang digunakan antara lain berupa berita diperoleh. Sumber data sekunder yang surat kabar, website, artikel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara (interview), Dokumentasi, Observasi

## Teknik Analisis Data

Tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi mencakup banyak tahap, di antaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data, yang tidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif dalam Pawito (2001:104), yaitu analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yang terdiri :

1. Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.
2. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.
- 4.

## PEMBAHASAN

Agrowisata atau agritourism di Indonesia merupakan suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agrobisnis) sebagai objek wisata. Pengembangan agrowisata berbasis potensi lokal dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata yang akan dibahas dalam penelitian ini fokus pada 4 hal yang menjadi indikator pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Edward III yaitu :

1. Komunikasi, (yang berkenaan dengan daya dukung promosi)

Banyak negara menjadi terkenal oleh karena hasil komoditi pertanian yang menyebar luas ke berbagai negara dan dikonsumsi oleh masyarakat, seperti Thailand, New Zealand, Perancis dan lain – lain. Negara – negara tersebut terkenal disebabkan salah satunya melalui keaneka ragaman hasil komoditi pertanian. Thailand dikenal menghasilkan durian, burung perkutut, Bangkok telah membawa promosi negara tersebut untuk mendatangkan wisatawan. New Zealand dengan buah kiwinya, menjadikan negara tersebut dikenal sebagai negara buah kiwi dan burung kiwinya dilindungi. Indonesia sebagai negara agraris, telah banyak diperkenalkan melalui berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan lain – lain.

Dengan berkembangnya agrowisata disatu daerah paling tidak daerah tersebut akan terdorong menjadi terkenal dan menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut. Dampak yang cukup menarik adalah adanya keterkaitan antara agrowisata dengan promosi wisata.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan agrowisata, perlu mempertimbangkan secara seksama

beberapa aspek yang akan melatarbelakangi keberhasilan pengelolaan agrowisata seperti sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia adalah merupakan pengelolaan objek daya Tarik wisata (agrowisata) oleh karena sumberdaya manusia yang dibutuhkan disamping harus memiliki latar belakang pendidikan dibidangnya, harus pula memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola pekerjaannya. Tata cara pengelolaan komoditas usaha pertanian yang disajikan sebagai komoditi daya Tarik wisata pengelolaannya berbeda dengan hasil produksi pertanian pada umumnya. Faktor pengetahuan yang luas dalam bidang pertanian, keterampilan dalam bercocok tanam, sikap terhadap pekerjaan yang ditangani harus menjadi bagian penting bagi sumber daya manusia yang bekerja pada perusahaan objek dan daya Tarik wisata agro. Para petani memiliki skill dalam bercocok tanam perlu mendapatkan tambahan pengetahuan tentang ilmu tanaman, tumbuhan untuk pengembangan informasi kepada pengunjung.

### 3. Struktur Birokrasi atau Tata Aliran Kerja Kelembagaan

Lingkup pedoman kelembagaan adalah suatu ketentuan berupa sistem pengelolaan yang menjembatani berbagai kepentingan antara instansi terkait atau disebut protocol. Protocol diarahkan kepada pengaturan hubungan antara pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan baik dipusat maupun daerah, sesuai dengan kondisi daerah dan jenis agrowisata yang dikembangkan. Pihak – pihak stake holders yang berkepentingan dan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan kawasan agrowisata ini antara lain :

- a. Kantor Kementerian Pariwisata
- b. Dinas Pariwisata
- c. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

- d. Dinas Pertanian
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan
- f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- g. Dinas Perhubungan
- h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- i. Kanwil Pertanahan Nasional
- j. TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
- k. Pemerintah Daerah Tingkat I
- l. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota
- m. Dunia Usaha dan Masyarakat
- n. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Perguruan Tinggi dll

Lembaga – lembaga tersebut diatas seharusnya bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan agrowisata, berkaitan dengan penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan. Pengalokasian akses seperti akses informasi, komunikasi dan transportasi menjadi tanggung jawab sektor publik. Tetapi dalam implementasinya, sektor publik berkonsentrasi pada perangkat keras, dari akses – akses tersebut sedangkan perangkat lunak dan pengoperasiannya dapat dilakukan tidak hanya oleh sektor publik tetapi juga sektor swasta, terutama para pengusaha yang relevan dengan masing – masing akses tersebut. Pembangunan pusat – pusat informasi menjadi sangat krusial untuk memacu pengembangan agrowisata merupakan salah satu produk unggulan non migas bagi yang relevan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan agrowisata harus ada kegiatan pemantauan yang dilakukan pemuda. Untuk itu perlu ada instrument yang jelas dan terukur agar monitoring kegiatan agrowisata dapat dilakukan secara optimal.

Swasta dalam pengembangan agrowisata (perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha) diharapkan mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Swasta justru lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan agrowisata terutama pemasaran, penyediaan jasa dan operasional kegiatan, disini karena peran swasta melengkapi sektor publik. Oleh karena itu kedua stakeholder tersebut harus bekerjasama dan berkoordinasi agar kegiatan agrowisata dapat berjalan baik.

Dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan prinsip agrowisata, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat setempat sangat penting dan mutlak diperlukan. Kegiatan ini harus mengakomodasi dan terintegrasi dengan budaya lokal serta harus memberikan manfaat ekonomi dalam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan keterampilan melalui pendidikan latihan agar kesempatan dan kemampuan masyarakat dapat memberikan peran yang lebih besar dalam kegiatan agrowisata.

Kerjasama dan koordinasi antar berbagai stake holder terkait dalam pengusahaan agrowisata sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan agrowisata. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai stakeholder dapat bervariasi, mulai dari informasi sampai dengan bentuk kerjasama juga sangat luas meliputi semua proses pengembangan agrowisata yaitu dimulai dari perencanaan seperti penetapan lokasi kawasan, pelaksanaan kegiatan termasuk operasional sampai kepada pemantauan kegiatan agar dapat dicapai sasaran secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat khususnya sebagaimana konsep pengembangan kawasan agrowisata.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bertitik tolak pada uraian – uraian sebelumnya serta hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata maka peran komunikasi menjadi sangat penting yaitu melalui penguatan promosi baik dalam negeri maupun ke manca negara untuk memperkenalkan apa yang menjadi produk unggulan suatu daerah serta ciri khas daerah seperti seni dan budaya industri kerajinan, keindahan panorama alamnya serta perkebunan dengan aneka ragam tanaman mulai dari buah – buahan, sayur – mayur seperti yang ada di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan yang oleh pemerintah daerah telah dijadikan salah satu destinasi pariwisata berbasis agrowisata.
2. Untuk kepentingan perkembangan pariwisata berbasis agrowisata ini pemerintah daerah, pemerintah Kecamatan Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pihak swasta, biro perjalanan, lembaga - lembaga sosial, media elektronik, media massa, untuk bersama-sama mempromosikan apa yang menjadi produk unggulan serta ciri khas daerah yang tidak ada di daerah lain sehingga para wisatawan mengetahui dan tertarik untuk datang berkunjung ke lokasi wisata berbasis agrowisata seperti yang ada di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Hasil penelitian melalui teknik wawancara diperoleh fakta bahwa para petani hortikultura di Kecamatan Modinding mengalami kesulitan modal untuk menggarap perkebunan mereka karena bantuan yang diberikan pemerintah sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk biaya penggarapan kebun terpaksa mereka harus meminjam uang dari bank melalui program kredit usaha rakyat (KUR) untuk itu mereka meminta komitmen pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada para petani agar mereka memperoleh kemudahan dalam pengembangan produksi hasil pertanian mereka.

4. Para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding juga berharap kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada para petani mengenai cara bercocok tanam yang baik dan modern agar kualitas tanaman terutama sayur – mayur dapat ditingkatkan dan mencapai standar yang lebih baik seperti kentang Modoinding yang kualitasnya sudah terkenal dimana – mana

#### **Saran**

1. Untuk pengembangan pariwisata berbasis agrowisata, disarankan kepada pemerintah daerah agar memperkuat kegiatan promosi keluar negeri agar keberadaan pariwisata berbasis agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan semakin dikenal orang tertarik untuk berkunjung.
2. Disarankan juga kepada pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan agar berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti pihak swasta, biro perjalanan, media agar secara bersama – sama bersinergi dalam melakukan promosi baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pentaseni dan budaya alat peraga yang telah dipersiapkan untuk memperkenalkan apa yang menjadi produk andalan secara ciri khas daerah.
3. Dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis agrowisata maka kepada pemerintah disarankan untuk memberikan bantuan kepada para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding untuk pembiayaan pengolahan lahan perkebunan mereka sehingga mereka tidak terbebani dengan pembayaran cicilan hutang di bank tapi berkonsentrasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka khususnya di lokasi pariwisata berbasis agrowisata.
4. Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian juga kualitasnya, maka kepada pemerintah diharapkan dapat menyusun dan membuat program pelatihan kepada para petani hortikultura di Kecamatan

Modoinding termasuk bimbingan teknis dengan menerapkan teknologi pertanian modern agar lebih menarik para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata berbasis agrowisata yang ada di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukur. 2000. Budaya Birokrasi Indonesia. Jakarta PT. Pustaka Utama.
- Agustina, Leo. 2006. Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta.
- A. G. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik ; Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maleong, Lexy. J, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muljadi. 2012. Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta Rajawali pers.
- Nugroho Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Raden Ardimas Suryo Prabowo. 2011. Identifikasi Potensi Lanskap Agrowisata. Kawasan Perbukitan Menoreh di Samigaluh Kabupaten Kuloprogo. Usulan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Said Zaenal Abidin. 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancar Jiwah.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung.
- Suhado, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Rafika Aditama.

Utama. G. B. R dan Junaedi, W. R, 2018. Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia. Yogyakarta Deepublish.

Putra. Fadillah 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Pawito. 2001. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.

Wesda Pariata. DKK. 2000. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta. Gunung Agung.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

Sumber lain :

- Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Keputusan Menteri Pertanian No:357/KPTS/HK.350/5/2002 tentang pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
- Keputusan Menteri Pertanian No : 319/KPTS/KP/50/6/2003 tentang Komisi Wisata Agro Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.